

## PENUGASAN PASUKAN GARUDA VII KE VIETNAM TAHUN 1974-1975

**Tegar Ichtiar Rachman**

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya  
[clamsell@gmail.com](mailto:clamsell@gmail.com)

**Aminuddin Kasdi**

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya

### ABSTRAK

Perancis menguasai Vietnam pada akhir 1800-an. Nama Perancis tidak cemerlang semasa menduduki Indochina dikarenakan gaya kepemimpinannya yang kolonialisme totaliter, sehingga mengakibatkan tumbuhnya berbagai gerakan nasionalis anti Perancis. Perancis mengatur Vietnam sampai tahun 1940, ketika Jepang menduduki selama Perang Dunia II. Setelah Jepang menyatakan kekalahannya, Perancis mencoba untuk mendapatkan kembali kontrol dari Vietnam. maka Pertempuran pecah antara pasukan Prancis dan Vietminh. Untuk mengakhiri konflik, maka diadakan perjanjian di Genewa, Swiss pada tahun 1954 yang membagi wilayah Vietnam menjadi dua, tetapi konflik masih terus berlanjut, hingga pada akhirnya pada tahun 1973 diadakan Perjanjian Paris. Terdapat tiga rumusan masalah (1) Bagaimana kondisi awal Vietnam setelah disepakatinya perjanjian Paris 1973? (2) Bagaimana latar belakang penugasan Pasukan Garuda VII ke Vietnam? (3) Mengapa Pasukan Garuda VII ditarik dari Vietnam tahun 1975?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Langkah pertama adalah tahap *heuristik*, yaitu mengumpulkan sumber data yang didapat melalui sumber yang berasal dari artikel majalah sejawat. Selanjutnya dilakukan kritik dengan cara membaca sumber, penulis akan menemukan keterkaitan sumber yang akan diteliti. Dilanjutkan melakukan penafsiran, menghubungkan fakta satu dan yang lain lalu menafsirkannya. Terakhir yaitu tahap historiografi atau penulisan sejarah. Latar belakang penugasan pasukan Garuda VII ke Vietnam adalah ketika India mengundurkan diri dari keanggotaan ICC (*International Commission and Control*), untuk merealisasikan isi Persetujuan Paris untuk membentuk ICCS (*International Commission of Control and Supervision*) yang beranggotakan 4 negara, Indonesia mendapat permintaan untuk bergabung melalui utusan istimewa Amerika, Henry Kissinger dan juga permintaan dari Vietnam Utara melalui duta besar Indonesia di Hanoi. Kondisi paska penandatanganan perjanjian Paris 1973 yang semakin memburuk serta berbagai hal seperti kemelut di dalam tubuh ICCS serta persenjataan yang tidak memadai membuat keselamatan para prajurit Pasukan Garuda VII di Vietnam menjadi terancam hingga pada akhirnya muncul keputusan untuk menarik kembali pasukan ke tanah air.

**Kata Kunci :** *Vietnam, Pasukan Garuda*

### ABSTRACT

French controlled Vietnam in the late 1800's. French names are not brightly occupied Indochina during the colonialism because of the totalitarian style of leadership, resulting in the growth of a variety of anti-French nationalist movement. France conquer Vietnam until 1940, when Japan occupied during World War II. After Japan declared defeat, the French tried to regain control of Vietnam. Fighting broke out between the French and the Vietminh forces. To end the conflict, the agreement was held in Geneva, Switzerland in 1954 which divided Vietnam into two areas, but the conflict continues, until finally in 1973 the Treaty of Paris was held. There are three formulation of the problem (1) How the initial condition Vietnam after the signing of the treaty of Paris in 1973? (2) background of process assignment VII Garuda troops to Vietnam? (3) Why VII Garuda troops withdrawn from Vietnam in 1975?. The method used in this study is the historical method. The first step is the phase heuristic, which collects data sources obtained through sources that come from contemporary magazine article. Further criticism is done by reading the source, the author will find link source to be studied. And continued to interpretation, linking the facts another one and then interpret it. Finally, the stage of historiography or historical writing.

Background assignment VII Garuda troops to Vietnam began when India withdrew from membership of the ICC (International Commission and Control), to realize the contents of Approval Paris to form the ICCS (International Commission of Control and Supervision) consisting of 4 countries, Indonesia has received a request to join through U.S. special envoy, Henry Kissinger and North Vietnam through a request from the Indonesian ambassador in Hanoi. Condition after the signing of the treaty of Paris 1973 is getting worse and various things like the enmity in ICCS and inadequate weaponry make safety the Garuda VII Forces soldier in Vietnam became threatened and eventually emerged the decision to pull back troops to their homeland.

**Key Word** : Vietnam, Garuda troops

## PENDAHULUAN

Hubungan internasional atau hubungan antar bangsa merupakan interaksi manusia antar bangsa baik secara individu maupun kelompok, dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan dapat berupa persahabatan, persengketaan, permusuhan ataupun peperangan.

Dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif ini bangsa Indonesia menjalin pergaulan dan kerjasama antar bangsa, dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala Negara<sup>1</sup>. Dalam melakukan kerjasama dan hubungan internasional ini Presiden dibantu oleh Departemen Luar Negeri yang dipimpin seorang Menteri Luar Negeri, para Duta dan Konsul yang diangkat Presiden. Hak mengangkat Duta dan Konsul ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945 dipegang oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dalam menerima Duta dan Konsul negara lain, presiden juga harus meminta persetujuan dari kepala negara di negara Duta dan Konsul tersebut akan bertugas dalam bentuk Surat Kepercayaan (*lettre de credence*).

Arti penting hubungan dan kerjasama internasional menurut Kusuma Atmaja, hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan negara yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar bangsa di dunia. Perlunya keberadaan Duta di negara lain dikarenakan suatu negeri pasti berhubungan dan bekerja dengan negara asing. Duta dan konsul itu bertugas menghubungkan dan melepaskan suatu hubungan dengan negara lain.

Sejarah keikutsertaan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui Pasukan Garuda diawali oleh penugasan Pasukan Garuda I ke Mesir, untuk membantu PBB mengatasi penarikan pasukan

Inggris, Perancis dan Israel kembali ke negaranya masing-masing. Pasukan Garuda II merupakan pasukan yang dibentuk kedua setelah Pasukan Garuda I dibentuk. Pasukan ini dikirim ke Kongo (Zaire) di bawah misi UNOC (*United Nation Operation in the Congo*)<sup>2</sup> yang bertugas menyelidiki kekacauan situasi di Kongo pasca merdeka dari Belgia<sup>3</sup>.

Selanjutnya adalah Pasukan Garuda III, Pasukan ini sama-sama ditugaskan di Kongo pada tahun 1962, dan dibawah misi yang sama yaitu UNOC dan selanjutnya adalah Pasukan Garuda VI memiliki persamaan daerah tugas dengan Pasukan Garuda I, pasukan ini ditugaskan ke Timur Tengah pada 1973. Pasukan Garuda VI berada di bawah misi UNEF dan dipimpin oleh Kolonel Infantri Rudini. Tugas pokok Pasukan Garuda VI adalah sebagai *peace keeping force* atau pasukan pemelihara perdamaian di Timur Tengah.

Pengiriman Pasukan Garuda IV, V dan VI memiliki alasan yang sama karena dibawah badan komando yang sama yaitu ICCS (*International Commission of Control and Supervision*/ Komisi Pengawas Internasional), dilatarbelakangi konflik yang terjadi di Vietnam. Perang Dingin yang terjadi antara Amerika dengan Uni Soviet berpengaruh hingga ke Asia Tenggara membuat Vietnam terpecah menjadi dua, yaitu Vietnam Selatan yang mendapat pengaruh dari Amerika dan Vietnam Utara yang mendapat pengaruh dari Soviet. Keinginan Vietnam Utara untuk menyatukan Vietnam membuat negeri itu dilanda peperangan. Amerika yang tidak ingin komunis menguasai Vietnam memutuskan untuk mengirim pasukan. Vietnam tidak boleh dikuasai oleh komunis karena daerah itu merupakan batu loncatan untuk memperluas pengaruh Amerika ke Asia Tenggara<sup>4</sup>.

Kondisi di Vietnam yang semakin memburuk juga adanya tuntutan dari masyarakat

<sup>2</sup> *The World Book Encyclopedia U-V vol.20.* 1973. Hlm. 49b

<sup>3</sup> Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia, <http://www.pkc-indonesia.com/index.php/sejarah/kontingen-garuda-indonesia-di-wilayah-afrika/konflik-congo>, diakses pada 17 Juli 2013, 06:55

<sup>4</sup> Harry Kawilarang. *Dunia di Tengah Kemelut Bunga Rampai Masalah Internasional 1983-1984*. Jakarta: UI Press, hlm 210

<sup>1</sup> Sumarsono Mestoko. 1988. *Indonesia dan Hubungan Antarbangsa*. Jakarta: PT Sinar Agape Press, hlm. 15

Amerika Serikat untuk menarik Pasukan Garuda kembali membuat diadakannya perundingan di Paris untuk mengakhiri keterlibatan Amerika di Vietnam serta meredakan konflik di Vietnam. Sebagai wujud pelaksanaan perjanjian itu maka dibentuklah ICCS yang menjadi komisi yang menaungi pasukan Indonesia (Pasukan Garuda IV, V dan VII) menjalankan tugas di Vietnam.

Ada dua pasukan yang terlebih dahulu dikirim oleh Indonesia yaitu Pasukan Garuda IV dan V<sup>5</sup>. Pasukan-pasukan itu berada di bawah naungan ICCS selaku badan yang menaungi pasukan dari empat Negara yang terpilih (Indonesia, Kanada, Polandia dan Hongaria). Pasukan Garuda VII dikirim setelah Pasukan Garuda ditarik kembali ke Indonesia pada April 1974

Dikirimnya pasukan Indonesia ke Vietnam bertujuan menjalin hubungan diplomasi antara Indonesia – Vietnam. Pengiriman pasukan itu juga sebagai tanda kepercayaan terhadap kekuatan militer Indonesia untuk menjaga perdamaian. Dalam Naungan ICCS pasukan Garuda VII menjalankan misi pengawasan penarikan pasukan Amerika secara bertahap dari Vietnam, serta pengawasan dan penjagaan perdamaian di sana. Latar belakang penugasan pasukan Garuda VII ke Vietnam adalah ketika India mengundurkan diri dari keanggotaan ICC (*International Commision and Control*), untuk merealisasikan isi Persetujuan Paris untuk membentuk ICCS (*International Commision of Control and Supervision*) yang beranggotakan 4 negara, Indonesia mendapat permintaan untuk bergabung melalui utusan istimewa Amerika, Henry Kissinger dan juga permintaan dari Vietnam Utara melalui duta besar Indonesia di Hanoi. Pasukan Garuda dikirim pada april 1974 namun seiring berjalannya waktu, kondisi di Vietnam semakin memburuk dan pada akhirnya Pasukan garuda ditarik kembali ke Indonesia pada Juni 1975

Penugasan Pasukan Garuda VII ke Vietnam menarik untuk diteliti karena belum ada yang membahas secara khusus ke dalam bentuk skripsi maupun buku. Oleh karena itu hal ini kemudian menjadi motivasi tersendiri untuk membahasnya lebih mendalam melalui sebuah penelitian.

## METODE

Dalam upaya menjawab permasalahan sesuai latar belakang yang telah ditentukan diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah yang merupakan seperangkat prosedur yang digunakan oleh sejarahwan dalam tugas meneliti dan

menyusun sejarah guna mendapatkan suatu fakta sejarah yang kredibel. Ilmu sejarah bersifat empiris, maka sangat penting untuk berpangkal pada data yang terdapat pada sumber sejarah.<sup>6</sup>

Metode yang digunakan oleh penulis sesuai dengan metode penelitian yang dikemukakan oleh Louis Gottschalk yakni: *heuristik, kritik sumber, intepretasi, dan historiografi*.<sup>7</sup>

Tahap pertama yang dilakukan adalah heuristik, yaitu metode atau tahapan yang digunakan dalam penulisan sejarah dengan mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada tahap ini sangat penting karena akan menentukan keabsahan dan validitas dari hasil tulisan nantinya. Dalam penelitian ini menggunakan sumber primer berupa majalah berita mingguan sejaman yang memuat informasi tentang Penugasan Pasukan Garuda VII. Di samping itu sumber sekunder berupa buku-buku sejaman maupun sesudahnya juga yang berkaitan tentang sejarah Vietnam serta kebijakan luar negeri Indonesia. Buku-buku sekunder digunakan penulis unuk melengkapi data-data penulisan skripsi ini.

Beberapa sumber primer yang diperoleh berupa sumber tertulis dalam bentuk dokumen dan majalah berita mingguan sejaman yang memberikan informasi seputar objek yang dikaji. Sumber primer tersebut meliputi: (1) Dokumen Sekretariat Negara Sekretariat Militer Presiden No: R-284/SETMIL/C/IV/1975. 1975. Situasi Terakhir di Vietnam Selatan Tgl. 24 Maret 1975. Dokumen tersebut berisi situasi Vietnam pada tahun 1975 serta analisa Interlijen Indonesia yang tertuang menjadi sarana untuk menarik Pasukan/Kontingen Garuda dari Vietnam, Penulis mendapatkan dokumen ini di Perpustakaan Satria Mandala Jakarta.(2) Dokumen Departemen Pertahanan Keamanan G-1/ Intelijen. No: LP/G-1/1-067/XII 1973. Laporan Perkembangan (Vietnam), merupakan dokumen yang memuat tentang kegiatan Pasukan Garuda IV dan V di Vietnam, serta situasi politik Vietnam pada tahun 1973, sumber ini diperoleh di Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta.

Sumber sekunder yang diperoleh antara lain buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan judul maupun tema yang diambil, yang menyangkut antara lain mengenai Vietnam, pasukan garuda dan hubungan Internasional.

Sumber-sumber yang terkumpul selanjutnya dilakukan pengujian melalui kritik (*historical cristism*). Langkah yang dilakukan penuilis untuk menguji keaslian dan keakuratan dari data maupun

<sup>5</sup> 40 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia II Masa Pembangunan dan Pemantapan ABRI (1965-1985), hlm. 102

<sup>6</sup> Dudung Abdurrahman. 1999. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. hlm . 54

<sup>7</sup> Louis Gotschak.1986.*Mengerti Sejarah: Edisi Terjemahan.*( Jakarta: UI Press ), hlm .40



isi sumber-sumber yang penulis dapatkan dengan membandingkan data dari sumber satu dengan data sumber yang lain dengan maksud menegaskan “fakta tunggal” yang menjadi dasar untuk kontruksi sejarah.

Langkah selanjutnya melakukan interpretasi. Dalam interpretasi ini penulis menafsirkan data-data yang ditemukan menjadi fakta. Penafsiran ini dilakukan dengan cara menganalisis data, kemudian menyusun hubungan antar fakta yang telah diteliti dengan asumsi (hipotesis) tentang fakta-fakta yang ada kesesuaian dengan tema penelitian. Dalam tahap ini tidak semua sumber/fakta sejarah dapat dimasukkan, namun harus dipilih mana yang relevan dan mana yang tidak relevan.

Terakhir yaitu historiografi. Historiografi merupakan proses merekonstruksi masa lampau berdasar atas fakta yang telah ditafsirkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan penulisan sejarah yang benar. Pada tahapan ini peneliti akan menyajikan sebuah tulisan sejarah yang berjudul “*Penugasan Pasukan Garuda VII di Vietnam Tahun 1975*” dengan benar sesuai dengan tata bahasa Indonesia baku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Latar Belakang Konflik di Vietnam

Vietnam merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara dengan ibukotanya Hanoi, luas negara ini adalah 329.707 kilometer persegi, merupakan negara dengan sejarah panjang untuk mendapatkan kemerdekaan. Pada zaman kuno, orang-orang Vietnam tinggal di Vietnam sebelah utara. China memerintah daerah itu sejak sekitar 100 SM sampai 900 masehi. Ketika orang Vietnam membentuk daerah independen selama 900 tahun berikutnya, secara bertahap memperluas wilayah mereka ke selatan sampai mereka menguasai semua apa yang sekarang Vietnam<sup>8</sup>.

Perancis menguasai Vietnam pada akhir 1800-an. Nama Perancis tidak cemerlang semasa menduduki Indochina dikarenakan gaya kepemimpinannya yang kolonialisme totaliter, sehingga mengakibatkan tumbuhnya berbagai gerakan nasionalis anti Perancis, seperti Ho Chi Minh dan Tranh Van Giau. Perancis mengatur Vietnam sampai tahun 1940, ketika Jepang menduduki selama Perang Dunia II. Setelah Jepang menyatakan kekalahannya pada 1945, Perancis mencoba untuk mendapatkan kembali kontrol dari Vietnam. Sebelumnya terdapat perjanjian bahwa setelah Jepang kalah, maka untuk menunggu datangnya pasukan Perancis maka wilayah Indochina akan dijaga oleh pasukan Inggris dan Cina yang

dibatasi oleh garis lintang 16<sup>9</sup>, namun ketika Inggris tiba di Saigon, daerah itu telah dikuasai oleh pasukan Vietminh. Pasukan Perancis tiba pada bulan Oktober 1945, maka Pertempuran pecah antara pasukan Perancis dan Vietminh yang didukung masyarakat Vietnam pada tahun 1946<sup>10</sup>.

Perang kembali terjadi pada bulan November 1946 di Haiphong, wilayah Tonkin. ketika Perancis menolak mengakui Vietnam secara keseluruhan, hal ini bertentangan dengan keinginan Vietminh, sebagai bentuk solidaritas seideologi Cina membantu Vietminh. Selama delapan tahun perang terjadi menyebabkan Perancis mengalami kerugian di bidang ekonomi dan militer. Agar tetap memperoleh pengaruh di Indochina, Perancis memohon bantuan Amerika. Untuk mewujudkan bantuan ini maka diadakan perundingan pasukan sekutu tingkat menteri luar negeri di Jenewa pada 26 April 1954.

Pada April 1954, sebuah konferensi Internasional diadakan di Jenewa, Swiss, untuk mengatur penyelesaian damai di Vietnam. Konferensi itu dihadiri wakil-wakil Vietminh dan Perancis. Tahun 1954 pada Konferensi Jenewa diputuskan untuk membagi Vietnam sementara menjadi dua zona. Para komunis menerima kendali wilayah di utara Vietnam yang dipimpin oleh Ho Chi Minh. Pemimpin Vietnam yang didukung oleh negara barat (Amerika Serikat) menerima kontrol di Vietnam selatan yang dipimpin oleh Ngo Dinh Diem<sup>11</sup>. Konferensi ini juga menyerukan dua negara itu untuk bersatu kembali melalui pemilihan umum pada tahun 1956. Namun para pemimpin utara dan selatan tidak setuju pada tata cara pelaksanaan pemilu<sup>12</sup> sehingga pemilu tidak jadi dilakukan.

Pada tahun 1957, pasukan komunis yang didukung Vietnam Utara mulai menyerang desa-desa di Vietnam Selatan. Amerika yang tidak ingin komunis berkembang ke Selatan ikut campur dalam konflik ini dengan mengirim pasukan ke Vietnam. Pertempuran ini secara bertahap berkembang menjadi perang Vietnam yang melibatkan tiga pihak yaitu Amerika, Vietnam Utara dan Selatan, yang terus berlanjut dari 1960 sampai tahun 1970. Pada tahun 1973 diadakan pertemuan di Paris untuk mengakhiri pertikaian antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, sesuai perjanjian tersebut maka Amerika menarik pasukannya dan memerintahkan Vietnam untuk segera melakukan penyatuan melalui pemilu

<sup>9</sup> Kawilarang, Harry. 1984. *Dunia di Tengah Kemelut Bunga Rampai Masalah Internasional 1983-1984*. Jakarta: UI-Press, hlm. 126

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *The Encyclopedia Americana International Edition Volume 28*. 1992. Grolier Incorporated, hlm 112

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 291

<sup>8</sup> *The World Book Encyclopedia U-V vol.20*. 1973, hlm. 290

## B. Perjanjian Paris 1973

Persetujuan Paris merupakan sebuah hasil dari pertemuan yang dilakukan di Paris, Perancis untuk mengakhiri konflik di Vietnam yang diselenggarakan pada tahun 1973. Persetujuan ini menghasilkan rumusan mengenai beberapa hal diantaranya, menarik mundur pasukan Amerika, gencatan senjata, dan upaya menciptakan perdamaian di Vietnam diantaranya melalui pemilu dan pembentukan pasukan penengah yang ditunjuk secara khusus, salah satu anggota pasukan penengah berasal dari Indonesia yang dikenal sebagai Pasukan Garuda.

Pada tanggal 28 Januari, 4 Menteri Luar Negeri (Amerika, Vietnam Selatan dan Vietnam Utara) telah siap di Meja Bundar di Gedung Pusat Konferensi Internasional yang terletak di jalan raya Kleber, Paris, untuk menandatangani naskah yang akan mengakhiri perang terpanjang bagi Amerika itu. Dari pihak Amerika diwakili oleh Menteri Luar Negeri William Rogers, Pemerintah Vietnam Selatan diwakili oleh Tran Van Lam, Pemerintah Revolusioner Republik Vietnam Selatan/ Provisional Revolutionary Government of South Vietnam (PRG) diwakili oleh Nguyen Thi Bhi, dan dari Vietnam Utara diwakili oleh Nguyen Duy Trinh. Sebagai saksi hadir para Duta Besar keempat Negara Komisi Pengawas Internasional (Indonesia, Kanada, Hongaria dan Polandia) serta seorang petugas protokol Perancis, Penandatanganan ini juga dihadiri oleh perwakilan 12 negara.

Ada dua jenis naskah persetujuan yang ditandatangani oleh ke empat Menteri Luar negeri pada tanggal 28 Januari 1973, yang pertama adalah naskah "Persetujuan mengakhiri perang dan pemulihan perdamaian di Vietnam" yang terdiri dari 23 pasal dan naskah jenis kedua berupa 4 buah protokol persetujuan, masing-masing mengenai: Komisi Pengawas Internasional, gencatan senjata serta Komisi Militer, Masalah Tawanan Perang dan yang terakhir adalah pembersihan ranjau<sup>13</sup>.

Berikut ini merupakan pokok-pokok Persetujuan Paris berdasarkan artikel majalah Tempo edisi 3 Februari 1973 halaman 9 yang terdiri atas 23 pasal, yang isinya yaitu:

Pasal 1 sampai 8 berisi segala hal mengenai penarikan pasukan Amerika dari Vietnam (menghormati kedaulatan Vietnam, gencatan senjata, pelepasan tawanan dan penarikan pasukan) terhitung 60 hari sejak penandatanganan perjanjian pasukan Amerika harus ditarik mundur kembali dan sejak pukul 24.00 waktu Vietnam, Amerika Serikat menghentikan seluruh operasi militer di Vietnam baik dari darat laut dan udara<sup>14</sup>.

Pasal 9 hingga 15 berisi peraturan mengenai pemilu di Vietnam serta menghormati gencatan senjata. Segera setelah gencatan senjata, kedua pihak Vietnam Selatan akan berunding untuk membentuk Dewan Nasional Kerukunan dan Kesepakatan Nasional, dewan inilah yang nantinya akan menentukan peraturan dan menyelenggarakan pemilu yang bebas dan demokratis<sup>15</sup>.

Pasal 16 sampai 19 berisi perihal konferensi Internasional yang dibentuk untuk mengakhiri perang, dengan membentuk komisi pengawas yang menjamin perdamaian di seluruh Vietnam.

Pasal 20 hingga 23 merupakan keinginan atau cita-cita setelah penandatanganan perjanjian akan terbentuk jaman baru, terbentuknya kedamaian di Vietnam dengan bantuan AS membantu menangani korban perang dan pembangunan kembali infrastruktur, untuk mempererat kembali hubungan Amerika Serikat dan Vietnam.

Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah dalam perjanjian bersama yang ditandatangani oleh ke-4 Menteri Luar Negeri itu tidak disebutkan dengan jelas siapa atau pemerintah mana yang mengadakan persetujuan. Baik naskah persetujuan maupun naskah-naskah protokol hanya menyebutkan siapa atau pemerintah mana yang mengadakan persetujuan<sup>16</sup>, dengan kata lain terjadi percobaan untuk menghindari pengakuan terhadap suatu pemerintah yang dilakukan oleh suatu pihak peserta perjanjian.

Dengan penandatanganan Perjanjian Paris belum berarti bahwa situasi politik yang memanas sebelumnya antara kedua belah pihak Amerika dan Vietnam akan langsung turun, presiden Nixon dalam pidatonya mengatakan "... mengakhiri perang barulah langkah pertama kearah pembinaan perdamaian"<sup>17</sup>, bisa diartikan dari pidato tersebut bahwa Amerika tidak akan begitu saja berhenti ikut campur di Vietnam setelah perjanjian Paris disahkan. Hal itu terbukti bahwa Amerika masih memberikan tuntutan terhadap Saigon maupun kepada Komisi Pengawas Internasional (KPI) untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi setelah Perjanjian Paris disahkan.

Persetujuan Paris yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1973, yang merupakan sebuah upaya untuk mengakhiri konflik di Vietnam ternyata belumlah benar-benar menghentikan konflik antara kedua belah pihak. Salah satu dari beberapa sebab mengapa Persetujuan Paris tidak bisa berjalan dengan efektif adalah karena Amerika, Uni Soviet dan RRC, telah sepakat bahwa dibandingkan dengan masalah-masalah antar negara-negara besar,

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 11

<sup>17</sup> [www.youtube.com](http://www.youtube.com) /Richard Nixon announces the Paris Peace Accords (1973) diakses tanggal 22 Juni 2013 pukul 21.48

<sup>13</sup> Tempo 3 Februari 1973, hlm. 11

<sup>14</sup> Tempo 3 Februari 1973, pasal 5 dan 2

masalah Vietnam menjadi tidak penting<sup>18</sup>. Masalah perbatasan yang dialami oleh RRC dan Uni Soviet menjadi pengalih terhadap perhatian mereka terhadap Vietnam utara.

Bagi para pemimpin Vietnam utara, persetujuan Paris pada 28 Januari 1973 merupakan momentum yang harus dilewati sebagai bagian dari upaya untuk menyatukan Vietnam dibawah pengaruh politik Hanoi. Para pemimpin Vietnam Utara saat itu menyadari bahwa bantuan dari Uni Soviet maupun RRT tidak akan sebesar ketika pertengahan tahun 1960, masa dimana perang dingin sedang memuncak, dan mereka menyadari bahwa para petinggi komunis baik di Moskow maupun Peking tetap berharap kepada Vietnam Utara agar tidak terlalu bergantung kepada salah satu dari mereka agar Vietnam Utara mentaati Persetujuan Paris, namun di satu sisi masih memperjuangkan penyatuan Vietnam di bawah pengaruh politik Vietnam Utara.

### C. Latar Belakang Penugasan Pasukan Garuda

Pasukan Garuda IV dan V, merupakan Pasukan yang dikirim terlebih dahulu ke Vietnam sebelum Pasukan Garuda VII. Pasukan Garuda IV dan V berada di bawah misi ICCS (*International Commision of Control and Supervision*), pasukan garuda IV dipimpin oleh Brigadir Jendral TNI Wiyogo Atmodarminto, pada tanggal 23 Januari 1973 Pasukan Garuda IV diberangkatkan menuju Vietnam dengan kekuatan 294 orang yang terdiri dari anggota ABRI dan PNS Departemen Luar Negeri. Tugas Pasukan Garuda IV meliputi pencegahan pelanggaran-pelanggaran, menjaga *status quo* paska disetujuinya Perjanjian Paris, mengawasi proses evakuasi pasukan dan alat-alat perang serta mengawasi pertukaran tawanan perang. Pasukan Garuda V dibawah pimpinan Brigadir TNI Harsoyo bertugas di Vietnam untuk misi kemanusiaan, pasukan itu turut serta mewujudkan perdamaian di Vietnam dan merebut hati rakyat salah satunya pada tanggal 1 Desember 1973 Deputy Militer Misriga V Brigjen Harsoyo menyerahkan uang sebesar 1,5 juta untuk bantuan korban banjir di Vietnam Selatan, penyerahan dilakukan di markas RVN (Republik Vietnam/ Vietnam Selatan), yang diterima oleh Brigjen Phan Hoa Hiep mewakili Palang Merah Vietnam Selatan<sup>19</sup>.

Dalam surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1973 terdapat lima bab yang mengatur perihal penugasan Pasukan Indonesia ke Vietnam yaitu bab I adalah Kedudukan dan Tugas, Pasal 1 yang berisi lima butir yaitu:

- 1) Guna menyelenggarakan Tugas Internasional di VIETNAM, di bentuk Misi Republik Indonesia Garuda disingkat Misriga.
- 2) Misriga merupakan Misi Nasional Republik Indonesia didalam Komite Pengawas Internasional Gencatan Senjata Vietnam, yang pengendalian operasionalnya ada pada Menteri Luar Negeri.
- 3) Tempat kedudukan Markas Misriga ditempatkan berdasarkan ketentuan - ketentuan dari komite Pengawas Internasional Gencatan Senjata di Vietnam
- 4) Misriga mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan Perjanjian Paris 1973, beserta Protokol -protokolnya.

Penjelasan dari 4 butir pasal 1 yang pertama adalah penetapan nama misi Indonesia ke Vietnam yang bernama Misriga (Misi Republik Indonesia Garuda) yang terdiri atas tiga pasukan yang dikirim secara bergelombang yaitu Pasukan Garuda IV, V dan VII. Lalu butir kedua, Misriga bekerja di bawah naungan Komisi Pengawas Internasional atau ICCS (*International Commision of Control and Supervision*), lalu butir ketiga merupakan ketentuan lokasi Misriga di Vietnam ditentukan oleh KPI, untuk Pelaksanaannya Vietnam Selatan dibagi dalam 7 region dan 35 *team site*<sup>20</sup>. Dan yang terakhir yaitu penjelasan mengenai tugas pokok Misriga untuk melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan Perjanjian Paris 1973 beserta protokol-protokolnya.

Selanjutnya Bab II, Susunan dan Wewenang, terdiri atas tiga pasal yaitu Pasal 2,3 dan 4, Pasal 2 memiliki dua butir yaitu :

- 1) MISRIGA dipimpin oleh seorang KETUA yang dijabat oleh seorang Pejabat Tinggi Departemen Luar Negeri berstatus Duta Besar.
- 2) KETUA MISRIGA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri.

Penjelasan dari pasal 2 yang terdiri atas dua butir aturan adalah yang pertama bahwa Misriga dipimpin oleh seorang ketua yang merupakan seorang Pejabat Tinggi Departemen Luar Negeri berstatus Duta Besar yaitu Letjen TNI H.R Dharsono yang kemudian digantikan oleh Mayjen TNI M. Charis Suhud sementara butir kedua aturan, Misriga bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri pada saat itu yaitu Adam Malik.

Pasukan Garuda VI memiliki perbedaan dalam daerah penugasan, pasukan ini ditugaskan ke Timur Tengah pada 1973. Pasukan Garuda VI berada di bawah misi UNEF dan dipimpin oleh Kolonel Infantri Rudini. Tugas pokok Pasukan

<sup>18</sup> Tempo. 30 Januari 1973, hlm. 12

<sup>19</sup> Departemen Pertahanan Keamanan G-1/ Intelijen. No: LP/G-1/1-067/XII 1973. Laporan Perkembangan (Vietnam)

<sup>20</sup> *Loc cit*, hlm. 102



garuda VI adalah sebagai *peace keeping force* atau pasukan pemelihara perdamaian. Pasukan ini berintikan Yonif 512/Brigif Kodam VII/Brawijaya dengan kekuatan tempur 466 orang, dibawah pimpinan Kolonel Infantri Rudini. sebagai Komandan Komando Taktis, ditunjuklah Mayor Basofi Sudirman. Atas permintaan PBB diberangkatkan pula Brigadir Jendral Himawan Sutanto sebagai komandan Brigade Selatan Pasukan PBB di Timur Tengah pada tanggal 13 Desember 1973. Pada tanggal 31 Desember 1974 pasukan ini menyelesaikan tugasnya dan tiba kembali ke tanah air.

Pasukan Garuda VI tidak dikirim ke Vietnam dikarenakan jangka waktu antara penugasan ke Timur Tengah dan Vietnam bersamaan waktunya, yaitu pada tahun 1973. Pasukan Garuda VI dikirim terlebih dahulu ke Timur Tengah sedangkan Pasukan Garuda VII yang merupakan kelanjutan penugasan pasukan ke Vietnam, dikirim setelah Pasukan Garuda V kembali ke tanah air pada tahun 1974<sup>21</sup>.

Pasukan Garuda VII merupakan pasukan terakhir yang dikirim ke Vietnam mengemban misi perdamaian di bawah naungan KPI (Komisi Pengawas Internasional/ ICCS, *International Commission of Control and Supervision*). Pasukan terakhir dari Misi Republik Indonesia Garuda (MISRIGA) yang bertugas di Vietnam yang sebelumnya berangkat adalah Pasukan Garuda IV dan V.

Keikutsertaan Indonesia dalam ICCS yang terdiri dari 4 negara (Indonesia, Kanada, Polandia, dan Hongaria) berawal dari pernyataan presiden Soeharto kepada utusan Istimewa Presiden Nixon, DR. Henry Kissinger di Brussel pada tanggal 22 November 1972, kemudian secara resmi Indonesia menerima permintaan Amerika Serikat untuk duduk dalam ICCS, disampaikan oleh Duta besar Amerika Serikat di Jakarta tanggal 24 Januari 1973, selain itu juga Indonesia mendapat permintaan yang sama dari Pemerintah Vietnam Utara melalui Dubes Indonesia di Hanoi tanggal 23 Januari 1973<sup>22</sup> dengan tujuan ingin ikut serta dalam menyelesaikan masalah sengketa di Vietnam, dan memberikan sumbangan positif untuk membantu menciptakan perdamaian secepatnya di Vietnam<sup>23</sup>. Pembentukan ICCS secara hukum termuat dalam Perjanjian Paris pasal 17 dan 18

Penugasan Pasukan Garuda ke Vietnam, berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1973, ditetapkan di

Jakarta 9 Juli 1973 oleh Presiden Soeharto<sup>24</sup>, dengan menimbang dua hal yaitu pertama bahwa dalam rangka persetujuan dan persepakatan perdamaian serta gencatan senjata di wilayah VIETNAM, Pemerintah Republik Indonesia diminta untuk ikut serta secara aktif membantu pelaksanaan persetujuan tersebut dan yang kedua bahwa untuk memenuhi Tugas Internasional tersebut perlu dibentuk sebuah Misi Republik Indonesia Garuda (MISRIGA).

Dengan berdasar dasar Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945<sup>25</sup>, Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954<sup>26</sup> dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1969, untuk penugasan pasukan Indonesia ke Vietnam, dengan kekuatan 290 orang Indonesia mengirimkan pasukan yang bernama Misi Republik Indonesia Garuda (Misriga) yang dikirimkan secara berkelanjutan dari Pasukan Garuda IV, V hingga yang terakhir VII, sesuai dengan Persetujuan Paris, Misriga dipimpin oleh 2 orang Deputy yaitu Deputy Politik dan Deputy Militer merangkap komandan kontingen. Misriga dipimpin oleh Letjen TNI H.R. Dharsono sebagai ketua Misriga kemudian diganti oleh Mayjen TNI M. Kharis Suhud<sup>27</sup>. Dalam menunaikan tugasnya di Vietnam Selatan, di dalam Misriga ditugaskan secara berkelanjutan yaitu: (1). Kontingen Garuda IV dari bulan Januari 1973 sampai Agustus 1973, yang dipimpin Komandan Brigjen TNI Wiyogo. (2) Kontingen Garuda V dari bulan Agustus 1973 sampai April 1974, dipimpin oleh Brigadir Jendral TNI Harsoyo. (3) Kontingen Garuda VII dari bulan April 1974 hingga November 1974, dipimpin oleh Brigadir Jendral TNI Soekemi Soemantri. (4) Kontingen Garuda VII (baru) dari bulan November 1974 sampai juni 1975, dipimpin oleh Brigadir Jendral TNI Bambang Soemantri.

#### D. Penarikan Pasukan Garuda VII dari Vietnam tahun 1975

Kemelut di Vietnam tetap terjadi meskipun Perjanjian paris telah disahkan, berbagai kerusuhan tetap terjadi di berbagai tempat. ICCS sebagai pengawas dan pengawal proses pembentukan perdamaian di Vietnam tidak berjalan dengan semestinya, berbagai hal persoalan melanda baik di tubuh ICCS maupun di Vietnam Selatan.

Demi keamanan para anggota Misriga (Misi Pasukan Garuda) yang bertugas di Vietnam, maka ketua Misriga membuat surat analisis keadaan Vietnam saat itu, sebagai bahan pertimbangan untuk

<sup>21</sup> 40 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia II Masa Pembangunan dan Pemanjatan ABRI (1965-1985). Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI 1985, hlm. 102

<sup>22</sup> *ibid*

<sup>23</sup> *ibid*

<sup>24</sup> KP0281973.Pdf diakses pada 14 Juni 2013, dari [jdih.ristek.go.id/?q=system/files/perundangan/815043003.pdf](http://jdih.ristek.go.id/?q=system/files/perundangan/815043003.pdf)

<sup>25</sup> Pasal 4 ayat 1 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar. Lihat UUD 1945

<sup>26</sup> Tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, UU NO 29 TH 1954

<sup>27</sup> *ibid*

menarik Pasukan Garuda kembali ke tanah air. Berdasarkan Laporan Sekretariat Negara dan Sekretariat Militer Presiden berisi tentang Laporan yang dibuat oleh Ketua Misi Republik Indonesia Garuda di Vietnam, M. Kharis Suhud ada 6 *point* penilaian sebagai bahan rujukan bagi Wakil Presiden Republik Indonesia mengambil keputusan bahwa keberadaan Misriga di Konflik Vietnam yaitu, (1) Perjanjian Paris, (2) ICCS, (3) Sikap-sikap negara besar, (4) Pasukan Gerilyawan, (5) Republik Vietnam Nasionalis, dan (6) Misriga.

Berdasarkan laporan diatas, Misriga sebagai pasukan perdamaian Garuda VII yang bertugas di Vietnam perlu mempertimbangkan perkembangan situasi konflik Vietnam yang tidak kunjung berakhir. Situasi ini menjadi alasan Garuda VII untuk mengusulkan proses penarikan dari Vietnam. Dasar usulan penarikan ini karena situasi Vietnam pada saat itu sudah sangat kacau. Kekacauan ini disebabkan adanya penyimpangan kesepakatan Perjanjian Paris dan konflik internal di dalam tubuh ICCS.

Indikasi penyimpangan perjanjian Paris yaitu ketika Tidak diwujudkannya pasal-pasal yang disepakati pada Perjanjian Paris antara kedua belah pihak yang berseteru di Vietnam Selatan antara PRG/RDV dan RVN membuat situasi bertambah buruk, beberapa pasal utama yang menjelaskan mengenai perwujudan perdamaian di Vietnam Selatan terutama adalah pasal 10<sup>28</sup>, 11<sup>29</sup> dan 12<sup>30</sup> tidak dipatuhi oleh PRG/RDV sedangkan RVN lebih fokus kepada penyelenggaraan Pemilu sehingga serangan PRG/RDV di Vietnam Selatan lambat laun berdampak buruk bagi RVN.

Walaupun semua mengatakan mentaati Perjanjian Paris, tetapi pada kenyataannya bukan gencatan senjata yang terjadi, melainkan persengketaan antara PRG (Provisional Revolutionary Government)/RDV (Republik

Demokratik Vietnam) dan RVN yang semakin meningkat, tercatat 80 insiden yang terjadi dengan 44 dari pihak komunis dan 15 anggota RVN tewas<sup>31</sup>, sedangkan dari pihak penanda-tangan tidak ada usaha yang nyata untuk memperbaiki keadaan. Hal tersebut disebabkan tidak kompaknya anggota-anggota ICCS.

Ketidakkompakan ICCS dalam hal prosedur penyelidikan situasi gencatan senjata berdampak pada insiden yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari anggota ICCS. Pada tanggal 8 April 1973, helikopter milik KPI/ICCS tertembak yang memakan 11 korban jiwa dengan perincian 1 perwira Indonesia yaitu Kolonel Gunawan, 2 warga Hongaria, 1 warga Kanada, 2 Vietcong dan 5 awak berkebangsaan Amerika<sup>32</sup>. Menurut Jendral McAlpin dari kontingen Kanada, ada spekulasi dalam insiden tersebut bahwa penembakan itu disengaja untuk mencegah pihak KPI melanjutkan penyelidikannya di wilayah perbatasan Laos. Akibatnya Perjanjian Paris tidak bisa dipakai sebagai pegangan, maka dengan demikian jaminan keamanan dan keselamatan bagi anggota ICCS tidak ada. Maka dari itu harapan agar Perjanjian Paris dapat digunakan sebagai alat mewujudkan perdamaian terlalu jauh dari kenyataan.

Kalau PRG tidak pernah kendor tekadnya untuk menguasai Vietnam Selatan, sebaliknya RVN kurang memusatkan perhatian dan kegiatan Nasionalnya pada masalah Hankam dan terlalu banyak menyandarkan diri pada bantuan Amerika, Nilai dari Perjanjian Paris dan efektifitas dari ICCS dan anggapan bahwa pemilihan umum sesuai dengan Perjanjian Paris dapat segera dilaksanakan sehingga mengakibatkan strategi militernya ditekankan pada penguasaan pemusatan penduduk dan mengabaikan penguasaan wilayah.

Sebagai kelanjutan dari hal tersebut di atas maka segala kegiatan dan proyek pembangunan tidak akan atau kurang dikaitkan dengan masalah Hankamnas, sehingga terlalu melihat kepada masalah kesejahteraannya dan kurang memperhatikan kepada masalah keamanannya.

Angkatan Perangnya dipandang dari segi kekuatan individu dan alat perlengkapannya sangat besar akan tetapi kualitas nilai tempurnya sangat kurang sebagaimana terbukti dari kekalahan – kekalahan yang diderita pada tahun-tahun mendekati kejatuhannya pada 1975.

Banyak jumlah pengungsi yang melarikan diri dari daerah-daerah yang diduki PRG lebih menggambarkan ketakutan dan kepanikan rakyat yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap moril

<sup>28</sup> Pasal 10: kedua pihak di Vietnam Selatan berjanji menghormati gencatan senjata dan menjaga perdamaian di Vietnam Selatan, dengan menghindari semua konflik bersenjata. Tempo edisi 3 Februari 1973, hlm. 9

<sup>29</sup> Pasal 11: segera setelah berlakunya gencatan senjata, kedua belah pihak di Vietnam Selatan akan menggalang kerukunan dan kesepakatan nasional dengan mengakhiri permusuhan dan kebencian. Kedua belah pihak itu juga akan menjamin hak-hak azasi setiap warga yang hidup di wilayah Vietnam Selatan. *ibid*

<sup>30</sup> Pasal 12: Segera setelah gencatan senjata, kedua pihak Vietnam Selatan akan berunding untuk membentuk Dewan Nasional Kerukunan dan Kesepakatan Nasional yang terdiri dari tiga bagian yang sederajat. Dewan ini lah yang akan menentukan peraturan untuk, serta menyelenggarakan, pemilihan umum yang bebas dan demokratis. *ibid*, hlm 10

<sup>31</sup> Laporan Perkembangan (Vietnam). Departemen Pertahanan Keamanan G-1/Intelijen, hlm 3

<sup>32</sup> Tempo, 21 April 1973, hlm 12



bangsa secara keseluruhan termasuk angkatan perangannya.

Serangan dadakan yang mengakibatkan jatuhnya kota Ban Me Thuot, kota terdekat dari Saigon dan ketidak mampuan RVN untuk mengetahui posisi dan gerakan-gerakan lawannya menggambarkan lemahnya intelijen dan keamanan mereka. Dalam keadaan normal mungkin kemampuan tentara RVN untuk mempertahankan diri adalah cukup baik, akan tetapi sebagai akibat dari efek bola salju dari jatuhnya moril, maka kemampuan bertahan tersebut sangat diragukan.

Perintah Presiden Thieu untuk melepaskan Pegunungan Tengah dengan tujuan untuk bisa mempertahankan daerah sepanjang pantai yang memanjang dari utara ke selatan dalam prakteknya sukar dilaksanakan karena mudah bagi PRG/ RDV untuk memotong daerah tersebut di tengah-tengah, sehingga akhirnya daerah yang dikuasai oleh RVN hanya merupakan kantong-kantong di dalam wilayah yang dikuasai PRG/ RDV. Mengetahui hal tersebut, maka tanpa adanya campur tangan dari luar (USA), kemungkinan bagi RVN untuk mempertahankan diri tipis sekali dan jatuhnya RVN akan lebih cepat lagi apabila timbul pemberontakan-pemberontakan di Saigon sendiri.

ICCS Sudah sejak lama telah dinyatakan tidak efektif sebagai akibat tidak adanya kesepakatan di antara para anggotanya. Hal lain juga terjadi yaitu konflik antara delegasi Iran dengan Hongaria/ Polandia. Kemelut terjadi ketika terjadi kontak senjata di berbagai tempat Vietnam timbul pertentangan-pertentangan antara Iran-Hongaria dalam soal prosedur penyelidikan, pertentangan itu berakibat berhembusnya isu keluarnya Iran dari keanggotaan ICCS, Iran membantah isu tersebut.

Sebelum Iran masuk ke dalam keanggotaan ICCS, Kanada merupakan pasukan pertama yang keluar dari keanggotaan ICCS, Kanada mempermasalahkan prosedur penyelidikan yang dilakukan Polandia/Hongaria yang dinilai lambat dan berpihak kepada PRG/RDV yang memiliki paham yang sama yaitu Komunis. Hal itu berdampak pada keluarnya Kanada dari keanggotaan ICCS pada Agustus 1973<sup>33</sup>

Sebagai dampak ketidak efektifan dalam menjalankan tugasnya di Vietnam, tindakan-tindakan Misrifa dalam ICCS hanya bersifat tindakan delegasi nasional, yang tidak bisa mempengaruhi jalannya perkembangan situasi di Vietnam Selatan yang semakin memburuk.

Sejalan dengan kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh RDV maka sikap Hongaria/Polandia dan suaranya dalam ICCS makin keras yang seringkali mengakibatkan ditempatkannya Misrifa di posisi yang sulit.

Kesediaan USA (Amerika) dan Vietnam Selatan untuk membiayai ICCS, sedangkan PRG dan RDV sudah tidak mau membayar iurannya. Dengan terjadinya perkembangan terakhir di Vietnam Selatan, disangsikan apakah USA (Amerika) dan RVN masih bersedia membayar iurannya, sedangkan situasi keuangan ICCS sudah mengalami krisis.

Semakin memburuknya situasi di Vietnam yang disusul dengan jatuhnya Ban Me Thuot, Ibukota Provinsi Darlac ke tangan komunis, akhirnya menyadarkan pemerintah Indonesia akan tidak adanya lagi untuk mempertahankan pasukan lebih lama lagi di sana mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik :

*“ Jika keadaan terus saja makin memburuk kita akan tarik kontingen Indonesia pulang ke Jakarta ”*

Posisi Indonesia sebagai bagian dari ICCS memang bisa dibilang cukup sulit di Vietnam, sebagai Pasukan Penengah mereka hanya dibekali dengan persenjataan yang minim dengan resiko yang besar<sup>34</sup>

Situasi yang semakin memburuk di Vietnam pada akhirnya membuat Indonesia menarik mundur Pasukan Garuda kembali ke tanah air pada Juni 1975.

Dampak dari berakhirnya tugas Komisi Pengawas International (KPI/ ICCS, *International Commision of Control and Supervision*) termasuk Indonesia merupakan indikasi bahwa upaya penyatuan Vietnam dibawah pengaruh komunis sudah sangat dekat. Jatuhnya Ban Me Thuot, kota terdekat dari Saigon merupakan tanda bahwa tidak lama lagi Vietnam Selatan akan jatuh. Tidak lama setelah Ban Me Thuot jatuh, Saigon yang merupakan ibukota dari Vietnam Selatan berhasil diduduki oleh Vietcong pada tanggal 30 April 1975<sup>35</sup>.

## SIMPULAN

Kondisi awal di Vietnam paska ditandatangani perjanjian Paris adalah bahwa kemelut masih saja terjadi. Serangan gerilyawan untuk menguasai Vietnam Selatan tidak pernah surut, sedangkan Komisi Pengawas Internasional (KPI/ ICCS, *international commission of control and supervision*) menjadi tidak berarti tatkala didalam tubuh badan pengawas itu terjadi kemelut antar anggotanya dalam hal prosedur penyelidikan pelanggaran-pelanggaran kesepakatan yang ada dalam perjanjian Paris.

Latar belakang penugasan pasukan Garuda VII ke Vietnam adalah ketika India mengundurkan diri dari keanggotaan ICC (*International Commision*

<sup>33</sup>Sumber<http://www.vietnamwar.net/ICCS.htm> diakses pada 21 Mei 2013, 8.51

<sup>34</sup> Tempo, 3 Februari 1973

<sup>35</sup> *Vietnam di Jakarta*, Tempo, 10 Mei 1975, hlm. 6

and Control), untuk merealisasikan isi Persetujuan Paris untuk membentuk ICCS (*International Commission of Control and Supervision*) yang beranggotakan 4 negara, Indonesia mendapat permintaan untuk bergabung melalui utusan istimewa Amerika, Henry Kissinger dan juga permintaan dari Vietnam Utara melalui duta besar Indonesia di Hanoi.

Penarikan Pasukan Garuda kembali ke tanah air. Berdasarkan Laporan Sekretariat Negara dan Sekretariat Militer Presiden berisi tentang Laporan yang dibuat oleh Ketua Misi Republik Indonesia Garuda di Vietnam, M. Kharis Suhud ada 6 *point* penilaian sebagai bahan rujukan bagi Wakil Presiden Republik Indonesia mengambil keputusan bahwa keberadaan Misrigha di Konflik Vietnam yaitu, (1) Perjanjian Paris, (2) ICCS, (3) Sikap-sikap negara besar, (4) Pasukan Gerilyawan, (5) Republik Vietnam Nasionalis, dan (6) Misrigha. Pelanggaran Kesepakatan Paris, pertikaian internal ICCS membuat situasi di Vietnam semakin buruk, demi menjaga keselamatan para personil Misrigha Garuda VII, maka pada akhirnya pasukan ditarik pada Juni 1975.

#### SARAN

Pasukan Garuda Indonesia dalam perannya ikut serta menjaga perdamaian belumlah banyak dikaji lebih jauh dalam bentuk literatur buku maupun online, menjadi kendala bagi masyarakat terutama akademisi untuk mempelajari segala sesuatu mengenai Pasukan ini.

Penelitian dalam bentuk skripsi ini masih memiliki kekurangan dalam berbagai hal, kedalaman penulisan sumber, serta penyusunan kata yang kurang tepat masih ada. Oleh sebab itu diharapkan adanya penelitian yang lebih dalam mengenai Pasukan Garuda dapat dilakukan di masa depan dengan tujuan mengungkap fakta sejarah yang dapat membangkitkan semangat dan rasa cinta kepada tanah air kita Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku - buku

- 40 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia II Masa Pembangunan dan Pemantapan ABRI (1965-1985). Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI 1985
- 50 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1995. 1995. Jakarta: PT Citra Media Persada
- Abdulgani, Ruslan. 1978. *Indochina Dalam Kawasan Asia Tenggara Dewasa Ini*. Jakarta: Yayasan Idayu
- Kawilarang, Harry. 1984. *Dunia di Tengah Kemelut Bunga Rampai Masalah Internasional 1983-1984*. Jakarta: UI-Press
- Ricklefs, M.C.. 2009. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Ensiklopedia Indonesia. 1992. *Seri Geografi Asia*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve
- Noorwijanto, Suradji. 1992. *Pengantar Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya: Unipress IKIP Surabaya
- Mestoko, Sumarsono. 1998. *Indonesia dan Hubungan Antarbangsa*. Jakarta: PT Sinar Agape Press
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo
- A.B Lopian, Susanto Zuhdi, dkk. 1996. *Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959*. Jakarta: CV Defit Prima Karya
- Noorwijanto, Suraji. 2002. *Vietnam Bersatu Perkembangan dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Politik di Asia Tenggara*. Surabaya: Unesa University Press
- Gayo, Iwan. 1994. *Buku Pintar Seri Senior*. Jakarta: Upaya Warga Negara
- Suryohadiprojo, Sayidiman. 2005. *Si Vis Pacem Para Bellum Membangun Pertahanan yang Modern dan Efektif*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- The Encyclopedia Americana International Edition Volume 28*. 1992. Grolier Incorporated

##### B. Arsip

- Departemen Pertahanan Keamanan G-1/ Intelijen. No: LP/G-1/1-067/XII 1973. Laporan Perkembangan (Vietnam)
- Sekretariat Negara Sekretariat Militer Presiden No: R-284/ SETMIL/C/IV/1975. 1975. Situasi Terakhir di Vietnam Selatan Tgl. 24 Maret 1975